

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN
DISKON TARIF BAYAR LISTRIK
MASA PANDEMI *COVID-19***

(Studi di Perusahaan Listrik Negara [PLN] Rayon Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Sari Yulianingsih

1621030187

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/2020 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN
DISKON TARIF BAYAR LISTRIK
MASA PANDEMI *COVID-19***

(Studi di Perusahaan Listrik Negara [PLN] Rayon Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Sari Yulianingsih

1621030187

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/2020 M

ABSTRAK

PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) sendiri merupakan salah satu penghasil pendapatan bagi negara hal ini dikarenakan kepemilikan perusahaan ini dipegang oleh Negara, dengan adanya virus *Covid-19* yang menyebar dan menjadi pandemi di seluruh dunia, listrik semakin menjadi kebutuhan yang penting, bagaimana tidak, dengan adanya *Covid-19* yang ikut menyebar masuk ke Indonesia menjadikan pemerintah membuat suatu kebijakan salah satunya penetapan diskon tarif bayar listrik bagi yang masuk kriteria, yakni mereka yang mendapatkan subsidi listrik bertegangan 900VA. Bagi yang memiliki tegangan listrik 900VA bersubsidi akan dikenakan biaya potongan sebesar 50% dari jumlah tertinggi selama 3 bulan pembayaran. Adapun cara untuk mendapatkannya bisa melalui Web www.pln.co.id ataupun melalui WhatsApp di 08122-123-123. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif melalui cara berfikir deduktif, Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi, adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yakni berjumlah 32.157 dan untuk jumlah karyawan dari Rayon Pringsewu ini berjumlah 15 orang, sedangkan untuk penentuan sampelnya dengan mempertimbangkan berbagai hal yakni dari segi waktu yang cukup terbatas serta tenaga yang dimiliki penulis maka sampel hanya diambil 15 rumah tangga penerima listrik bersubsidi 900VA dan 2 orang karyawan di Rayon Pringsewu. Dalam pelaksanaan dari praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sesuai dengan ketentuan Surat dari Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI tanggal 31 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Diskon Tarif Tenaga Listrik. Dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sudah sesuai dengan hukum Islam dimana rukun syarat dalam jual belinya telah terpenuhi adapun *tas'ir* yang dilakukan oleh pemerintah telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang sehingga *tas'ir* tersebut diperbolehkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sari Yulianingsih
NPM : 1621030187
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di Perusahaan Listrik Negara [PLN] Rayon Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020

Penulis


Sari Yulianingsih
NPM. 1621030187



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Amal A. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721)703260 Kodepos 35131

PERSETUJUAN

Tan Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Sari Yulianingsih
NPM : 1621030187
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENETAPAN DISKON TARIF BAYAR LISTRIK
MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Perusahaan
Listrik Negara [PLN] Rayon Pringsewu)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wivos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENETAPAN DISKON TARIF BAYAR LISTRIK MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus di PLN Rayon Pringsewu), disusun oleh: **Sari Yulianingsih, NPM:**

1621030187, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris Sidang : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Marwin, M.H. (.....)

Penguji Pendamping I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Orang tua ku tercinta, Bapak Sukemi, dan Ibu Parwati Alm. terimakasih karena telah menafkahi keluarga dan telah membimbing penulis dengan ahlak yang mulia sebagai manusia, dan selalu mendo'akan anak-anaknya serta mengingatkan penulis kepada Allah SWT,
2. Kakak-kakakku Suko Wati dan Suci Wulandari S.H.I., yang selalu memberikan canda tawa serta dukungan penuh disela-sela aktifitas padat penulis. Semoga Allah SWT memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada kita semua.
3. Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai awal perjalanan penulis dalam membentuk kedewasaan diri.

RIWAYAT HIDUP

Sari Yulianingsih dilahirkan di Desa Sungai langka, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran. Pada Tanggal 21 Juli 1998, anak ketiga dari pasangan suami isteri setia bapak Sukemi dan Ibu Parwiati.

1. Penulis mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Darma Wanita dan lulus pada tahun 2004
2. Melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 02 Sungai Langka, dan lulus pada tahun 2010.
3. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Gedongtataan, lulus pada tahun 2013.
4. Melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Gedongtataan, lulus pada tahun 2016.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 01 Desember 2020

SARI YULIANINGSIH
NPM. 1621030187

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19*” (Studi kasus di PLN Rayon Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu) dapat diselesaikan, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.

4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.SI. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
5. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan saran-saran terbaiknya.
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kawan-kawanku tersayang, Meti Mulia, Novia Anggih Sunarsih, Nurhasian, Novita Sari
8. Sahabat-sahabat Muamalah D dan semua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau lebih tepatnya jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan, kekurangan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi literasi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 01 Desember 2020

SARI YULIANINGSIH
NPM. 1621030187

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Singnifikasi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian	6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Islam	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-macam Jual Beli	22
5. Khiyar Dalam Jual Beli	27
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	32
7. Jual Beli Listrik Permeter	35
B. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam	38
C. Diskon.....	46
1. Pengertian Diskon	46
2. Jenis-jenis Diskon.....	47
3. Tujuan Pemberian Diskon.....	48
D. Tinjauan Pustaka	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dasar Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik	54
B. Gambaran Umum PLN Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu	55
C. Praktik Pelaksanaan Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di PLN Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pelaksanaan Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu Kabupaten Pringsewu	79
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	86

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

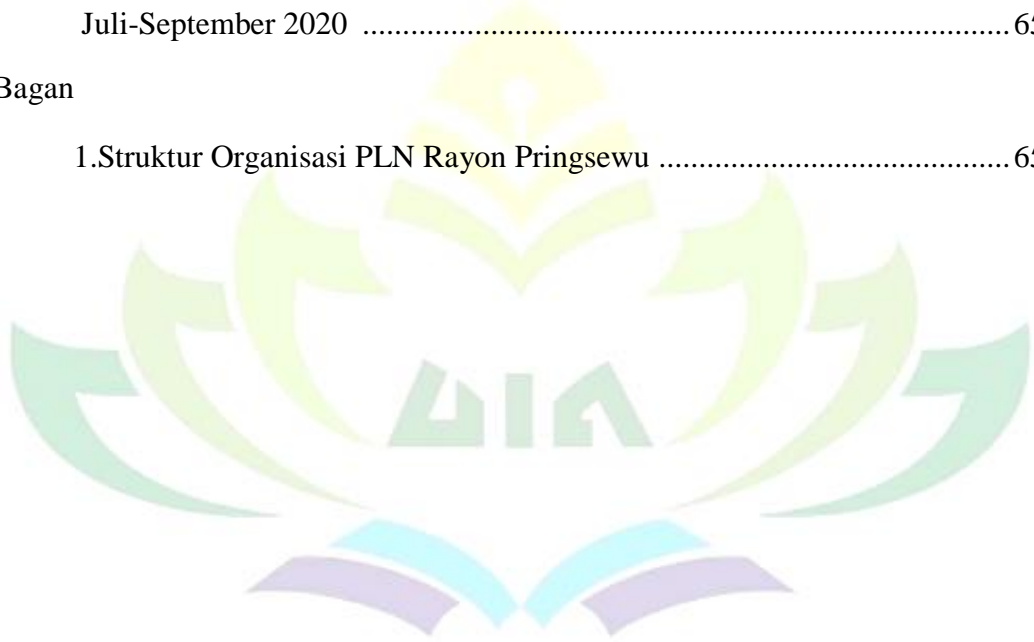
DAFTAR TABEL

Tabel

1. Data kecamatan dan pekon yang menjadi wilayah kerja PLN
Rayon Pringsewu di Kabupaten Pringsewu 60
2. Data kecamatan dan pekon yang menjadi wilayah kerja PLN
Rayon Pringsewu di Kabupaten Pesawaran..... 63
3. Daftar besaran tarif bayar listrik daya 450 VA – 900 VA
Juli-September 2020 65

Bagan

1. Struktur Organisasi PLN Rayon Pringsewu 65



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dengan adanya kerangka awal ini diharapkan dapat memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini. Untuk itu terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judulnya adalah: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19*” istilah dari judul tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik didunia dan diakhirat.² Penerapan hukum Islam adalah dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan.³
3. Penetapan adalah merupakan tindakan menetapkan/menentukan kaidah hukum konkret dan berlaku khusus.
4. Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada konsumen.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.4, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.3

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), h. 14

5. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya gesekan melalui proses kimia dan dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin.⁴
6. Pandemi *Covid-19* yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah yang luas dan merupakan *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang terjadi pertama kali di Wuhan Cina pada Desember 2019, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa maksud dari skripsi ini yaitu mengkaji tentang Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19* menurut Hukum Islam yang terjadi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Mengingat kesulitan yang berasal dari dampak *Covid-19* yang tengah terjadi, membuat pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan bantuan berupa penetapan diskon tarif bayar listrik bagi masyarakat yang memiliki kriteria tertentu.
- b. Praktik ini terjadi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

⁴ *Ibid*, h. 836

⁵ Pengertian *Covid-19*, (On-line), tersedia di: <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

2. Alasan Subyektif

- a. Dilihat dari aspek pembahasan, judul ini dan materi yang tersaji hingga pembahasannya sesuai dengan ilmu yang peneliti pelajari di bidang muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Sumber referensi yang dilakukan oleh penulis baik data primer ataupun skunder diperoleh dari buku-buku yang tersedia

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia tak mungkin bila ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka dari itu manusia akan membutuhkan makhluk lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah bermuamalah. Muamalah sendiri merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan dipuji nilai keimanan dan kehati-hatiannya serta kekonsistennannya dalam ajaran-ajaran Allah.⁶ Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.⁷

Pada saat ini penggunaan listrik semakin hari kian menjadi penting apalagi untuk daerah perkotaan, banyak kantor dan pabrik yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga perusahaan untuk bisa menjalankan kegiatan mereka. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) sendiri merupakan salah satu penghasil pendapatan bagi negara hal ini dikarenakan kepemilikan perusahaan ini dipegang oleh Negara, dengan adanya *virus Covid-19* yang menyebar dan

⁶ Ash-Shadiq Abdurahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 149

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2

menjadi pandemi di seluruh dunia, listrik semakin menjadi kebutuhan yang penting, bagaimana tidak, dengan adanya *Covid-19* yang ikut menyebar masuk ke Indonesia menjadikan pemerintah membuat suatu kebijakan untuk para pekerja yakni dengan menganjurkan agar mereka bekerja dari rumah (*work from home*), menjaga jarak aman antar satu sama lain (*social distancing*), menutup semua tempat wisata, juga rumah Ibadah. Akibat pandemi ini seluruh kegiatan dari mulai sektor ekonomi, pariwisata, dan yang lainnya ikut terkena imbas begitu pula dengan pemberhentian serentak para pekerja yang dilakukan oleh beberapa pabrik menjadi tekanan untuk bangsa Indonesia, krisis ekonomi pun terjadi dan sebagai langkah pemerintah untuk membantu rakyat maka alokasi dana dialihkan ke beberapa hal, salah satunya penetapan diskon tarif bayar listrik bagi yang masuk kriteria tertentu yakni mereka yang mendapatkan subsidi listrik bertegangan 900VA dengan potongan sebesar 50% dari jumlah tarif terbesar selama rentang waktu 3 bulan. Hal ini sesuai dengan Surat Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2020 perihal pelaksanaan Diskon Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

Latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19*” (Studi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai adanya penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19*, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19* yang sesuai dengan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran berupa fakta-fakta. Adapun mengenai masalah metode penelitian yang digunakan bermaksud untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan dalam meneliti: Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu) ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang berasal dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ataupun memaparkan sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari karyawan dari PLN Rayon Pringsewu dan

⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

masyarakat penerima penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *Covid-19*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam hal ini meliputi buku, dokumentasi, maupun berupa arsip dan juga seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian dengan adanya ciri yang sama. Populasi ini akan peneliti jadikan sebagai sampel dalam penelitian, keseluruhan populasi dari penerima subsidi listrik dan juga dari karyawan adalah 32.172. Dengan perincian untuk populasi rumah tangga sebagai penerima listrik 900 VA bersubsidi adalah 32.157 rumah tangga dan 15 karyawan dari Rayon Pringsewu.⁹

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akhirnya akan diteliti dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Metode yang digunakan dalam mengambil sampel adalah metode *non random sampling* dimana merupakan cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberikan kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel Dengan teori *purposive sampling* yakni cara

⁹ Wawancara dengan Hari Nugroho selaku SRM SDM dan MUM PLN UID Lampung tanggal 20 Oktober 2020

pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan atau dengan kata lain merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Salah satu cara yang digunakan untuk dapat menghitung ukuran sampel adalah menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin sendiri adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimal suatu penelitian yang mengestimasi proporsi.

	n= jumlah sampel
$n=N/(1+N.(e)^2)$	N=jumlah populasi
	e= batas toleransi kesalahan

$$n=N/(1+N.(e)^2)$$

$$n= 32.172/(1+32.172.(24\%)^2)$$

$$n= 32.172/(1+32.172.(0,24)^2)$$

$$n= 32.172/(1+32.172.(0,0576))$$

$$n= 32.172/(1+1853,1072)$$

$$n= 32.175/1854,1072$$

$$n= 17,351747515$$

Dilihat dari rumus dan juga hasil yang didapatkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan diambil berjumlah 17 orang yang berasal dari 2 desa, yakni dari Desa Sungai Langka dan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kunitatif,kualitatif,kombinasi dan R&D.* (Bandung: Alfabeta,2008), h. 144

Desa Bogorejo dengan jumlah 15 rumah tangga penerima listrik 900VA bersubsidi, serta 2 orang karyawan di Rayon Pringsewu.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan apabila tidak menerapkan metode pengumpulan data ini. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu :

a. Metode Wawancara

Yaitu mengenai suatu percakapan atau tanya jawab antar dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah atau topik tertentu, yang diperlukan peneliti untuk melengkapi laporan yang sedang ia teliti. Metode wawancara yang peneliti pergunakan ialah wawancara bebas terpimpin yakni membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan pedoman mengenai topik yang memang akan diteliti.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu baik dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya monumental. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terhimpun serta terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Editing*

Mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian.¹¹

b. *Sistematika*

Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data yang telah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

Data yang telah diperoleh, baik primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap, dan valid. Selanjutnya data akan dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasi serta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan.

6. Analisa Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data dianalisis kualitatif melalui cara berfikir deduktif. Metode deduktif ialah mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 182

diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya akan diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban atas permasalahan yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki barang secara sah menurut syara' adalah dengan *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan yang diperoleh dari transaksi jual beli.¹ Secara etimologi atau bahasa berarti *Al-Ba'i*, *Al-Tijârah*, dan *Al-Mubâdalah*.² Jual beli juga berarti pertukaran barang dengan barang (barter).³ Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴ Namun terdapat pula beberapa definisi lain yang dikemukakan oleh ulama, antara lain menurut Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang disenangi dengan yang semisal melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵ Menurut Mazhab Syafi'iyah, Mâlikiyah, dan Hanabilah bahwa jual beli, yaitu tukar-menukar harta benda dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶

Jual beli haruslah sesuai dengan ketentuan hukum atau *syara'* hal ini untuk menghindari adanya kezoliman yang mungkin saja terjadi, ketentuan

¹ Hamzah Yu'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h. 71

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Indo Persada, 2016), h. 21

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, cet.3 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), h. 101

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, cet.3, h. 101

hukum ini berupa pemenuhan akan rukun dan syarat, apabila rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka akad jual belinya bisa tidak sah atau batal.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt).⁷ Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta, biasanya barang dengan uang yang dilakukan dengan cara suka sama suka atau adanya suatu kerelaan melalui akad tertentu dengan tujuan agar barang tersebut dapat dimiliki, serta memenuhi ketentuan *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana dalam terlaksananya interaksi ekonomi dimasyarakat mempunyai landasan hukum dalam Islam, pedoman atau dasar hukum pelaksanaan transaksi ini bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.

a. al-Qur'an

Landasan syar'i sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 317

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ قَالَ أَفْضَلُ كَسْبٍ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَبَيْعُ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Abayah ibn Rifa'ah ibn Rafi' ibn Khadijdari kakeknya, Rafi'ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seseorang: apakah usaha yang paling baik? Rasul menjawab:“ perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. Ahmad No. 16628)⁹

Semua ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw hingga sekarang.¹⁰

c. Ijma'

Kaum muslimin telah bersepakat dari dahulu sampai sekarang mengenai kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2006) An-Nisa: 29

⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqhalani, Bulughul Maram Min Adillanti Ahkam, Terjemahan Achmad Sunarto, cet. 1(Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.303

¹⁰ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Abdul Majid,Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, (Jakarta Timur, Beirut Publishing, 2016), h.763

merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.¹¹ Hal ini pun cukup beralasan mengapa jual beli diperbolehkan yakni bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu hukumnya *mubâh*. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli adalah *mubâh* atau *jawâz (boleh)* apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, *mandûb*, dan *makrûh*

1) Hukumnya wajib

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual maka dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan. Jual beli seperti ini biasa terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu negara terhadap negara lainnya. Maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, *ibid.*, h. 15

Karena selain merugikan masyarakat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat. Jadi barang-barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada.

Atau seperti pada kasus seseorang mempunyai hutang, dan dia hanya mempunyai barang untuk melunasi utangnya tersebut, maka bagi dia hukumnya wajib menjual barang tersebut untuk melunasi hutangnya.¹²

2) Hukumnya sunnah (*mandūb*)

Jual beli yang dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kesesama saudaranya, temannya dan kaum kerabat yang lainnya.

Jadi hukum sunnah (*mandūb*) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat dekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaraan dan kekerabatan yang baik. Akan tetapi, apabila salah satu keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

¹² Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h.13-16

3) Hukumnya *makrūh*

Makrūh melaksanakan suatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras (*khamr*).

Ketentuan *makrūh* tersebut dikarenakan yang menjadi objek dalam jual beli tersebut dikhawatirkan akan merugikan orang lain dan terdapat unsur yang dilarang oleh syara'.

4) Hukumnya Haram

Hukum jual beli dalam Islam dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objek transaksi adalah sesuatu yang memang diharamkan untuk diperjual belikan oleh syara'

Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh syara', maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu berupa barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang pada dasarnya telah dilarang dalam agama, seperti jual beli babi, *khamr* dan lain sebagainya. Dan apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat

bahkan lebih, dari harga pasaranya, maka jual belinya menjadi tidak sah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum dimana hal ini akan mengakibatkan terjadinya konsekuensi berupa peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum tersebut haruslah terpenuhi semua rukun serta syarat-syaratnya. Agar usaha jual beli tersebut bisa berlangsung dengan cara yang dihalalkan menurut syara'.¹³

a. Rukun Jual Beli

Adapun akad jual beli, rukunnya ada terdiri dari tiga, demikian kata Imam Nawawi di dalam *Syarah Al-Muhadzdzab* yaitu: *Shîghât* yaitu (*ijâb* dan *qabûl*), *âqid* (orang yang melakukan transaksi, penjual-pembeli), dan *ma'qûd alaih* (objek akad).¹⁴

1) *Shîghât*

Shîghât itu adalah *ijâb* dan *qabûl* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijâb* dan *qabûl* atau cukup dengan *ijâb* saja yang menunjukkan *qabûl* dari pihak lain (secara otomatis).

Menurut sebagian ulama, *ijâb* adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik

¹³ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh Syarifuddin dan Mishbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman: 1995), h.535

dari pembeli ataupun penjual. Sedangkan *qabûl* adalah ungkapan kedua dimana ia muncul dari pihak yang lain untuk menanggapi *ijâb* berupa persetujuan terhadap pihak lain tersebut.¹⁵

2) '*âqid* adalah orang yang melakukan transaksi, yaitu mencakup penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut¹⁶

3) *ma'qûd alaih* (objek akad) terdiri dari benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak atau tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.¹⁷

b. Syarat Jual Beli

Para ahli fiqih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

1) Syarat yang berkaitan dengan *shîghât* (*ijâb* dan *qabûl*)

a) *ijâb* dan *qabûl* diucapkan oleh orang yang baligh dan berakal

b) *ijâb qabûl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahuai masyarakat.

c) *ijâb* dan *qabûl* dilakukan dalam satu majelis

¹⁵ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syaria*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27-28

¹⁶ Rizki Abdurahman, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bandung: Insan Rabbani, 2018), h. 39

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.168

d) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.¹⁸

2) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad ('*âqidain*, yaitu penjual dan pembeli)

a) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan juga sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila dan atau pingsan hukumnya tidak sah

b) Baligh

Merupakan masa kedewasaan seseorang dimana ia sudah dapat bertanggungjawab secara hukum. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan buruk

c) Tidak pemboros

Karena manusia yang boros dipandang sebagai seorang yang tidak cakap dalam hukum

d) Atas kemauannya sendiri

Jual beli haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur paksaan.

e) Syarat barang yang diperjualbelikan

(1) Barang yang diperjualbelikan harus suci

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, *ibid* h.22

Benda-benda najis tidak boleh diperjualbelikan misalnya bangkai, darah, daging babi, kotoran hewan, dll.¹⁹

(2) Punya Manfaat

Tidak boleh menjual sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya.²⁰

(3) Dimiliki oleh penjualnya

Barang yang dijual haruslah milik penjual atau milik orang lain yang mewakilkan penjualan kepadanya.²¹

(4) Bisa diserahkan

Barang tersebut mampu untuk diserahkan

(5) Diketahui keadaannya

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui berat, takaran, ukuran dan lainnya

4. Macam-macam Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli sebagai berikut:²²

a. Menurut sifatnya

Dilihat dari sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahîh* dan jual beli *ghairu shahîh*. Jual beli *shahîh* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 15

²⁰ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 150

²¹ Muhammad Ali, *Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja AURA, 2013), h. 97

²² Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 71-83

syaratnya. Sedangkan jual beli *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara'.

Apabila rukun syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut dengan jual beli yang *bâtil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli yang *fâsid*.

b. Menurut *shîghât*nya

Dilihat dari *shîghât*nya jual beli dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan jual beli *ghair mutlaq*. Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shîghât* yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada yang akan datang. Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang *shîghât*nya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.²³

c. Menurut hubungannya dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari objeknya

- 1) *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut juga dengan istilah barter.
- 2) *Shaft* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak atau menjual salah satunya dengan yang lain
- 3) *Muthalaq* adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang

²³ *Ibid.*, h. 85

d. Menurut harga atau ukurannya

Terdapat empat macam jual beli jika dilihat dari segi harga atau kadarnya yakni:²⁴

- 1) Jual beli *murâbahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang yang sesuai dengan harga aslinya.²⁵
- 3) Jual beli *wadiâh* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- 4) Pengertian jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawarkan sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

e. Menurut alat pembayarannya

Jual beli ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan persyaratan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertanda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

²⁴ *Ibid.*, h. 87

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*).

Adapun jual beli yang terlarang Allah SWT telah membolehkan hamba-hambaNya untuk melakukan jual beli dengan syarat selama transaksi itu tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya, menyebabkan ketersampingkannya ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain. Maka bagi orang yang memiliki kewajiban menunaikan ibadah sholat Jum'at tidak sah jual beli setelah terdengarnya panggilan adzan yang kedua. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Jumuah: 9)²⁶

Dalam ayat ini Allah telah melarang jual beli yang dilakukan saat panggilan adzan shalat Jum'at berkumandang. Kesibukannya dalam berdagang bukanlah alasan yang dibenarkan agama untuk meninggalkan shalat Jum'at.

Disebut dengan aktivitas jual beli karena jenis aktivitas ini merupakan aktivitas terpenting bagi manusia dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sebuah larangan selalu menunjukan keharaman dan

²⁶ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 554

tidak sahnya jual beli. Begitu juga diharamkan melakukan kesibukan selain jual beli yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban shalat.

Kewajiban ini tidak terkecuali bagi shalat-shalat fardu lainnya. Kewajiban tersebut tidak boleh digantikan dengan kesibukan melakukan jual beli atau kesibukan lainnya, ketika panggilan shalat sudah berkumandang mengajak manusia datang ke masjid.

Begitu juga tidak sah melakukan jual beli yang sesuatu kepada seseorang untuk maksiat atau hal-hal lain yang dilarang oleh Allah. Tidak diperbolehkan jual beli anggur peras yang digunakan sebagai *khamr*.

Jual beli senjata disaat kaum muslimin dalam keadaan fitnah tidak diperbolehkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak digunakan untuk membunuh sesama saudara muslim. Demikian juga tidak diperbolehkan memperjualbelikan semua alat peperangan dalam kondisi seperti ini.

Sebagai seorang mukmin haruslah menjunjung tinggi prinsip dalam jual beli, berikut adalah prinsip-prinsip jual beli dalam Islam:

1. prinsip halal
2. prinsip maslahah
3. prinsip terhindari dari investasi terlarang, yaitu:
 - a. Terhindar dari *ikhtikar*, yaitu upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan akan naik harganya.
 - b. Terhindar dari *iktinâz*, yaitu penimbunan harta seperti uang, emas, perak dll.

- c. Terhindar dari *tas'ir*, yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.
- d. Terhindar dari upaya melambungkan harga.
- e. Terhindar dari riba.
- f. Terhindar dari *maisir* (mengandung unsur perjudian).
- g. Terhindar dari *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan).
- h. Terhindar dari *syubhat* (perkara yang tercampur antarayang halal dan haram).
- i. Terhindar dari *tadlis* (mengandung unsure penipuan).
- j. Terhindar dari *riswah* (terdapat unsure suap-menyuap).
- k. Terhindar dari *bâtil* (tidak bermanfaat atau menimbulkan kemudharatan).

5. *Khiyâr* dalam Jual Beli

Khiyâr dalam jual beli adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli ataupun membatalkan akad tersebut. Hak *khiyâr* dalam jual beli menurut Islam diperbolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan barang yang diperjualbelikan, hukum dalam *khiyâr* adalah *mûbah*. Ulama membagi *khiyâr* dalam beberapa macam antara lain:

a. *Khiyâr al-Majlis*

Majlis berarti, tempat transaksi, dengan *khiyâr majlis* hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad jika masih berada

didalam satu *majlis*. *Khiyâr majlis* merupakan hak kedua belah pihak, waktunya dimulai dari awal akad dan berakhir saat jasad kedua belah pihak berpisah dari tempat akad berlangsung sekalipun akad tersebut berlangsung lama.²⁷ Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan *khiyâr majlis* ini. Para sahabat, tabi'i, jumhur ulama, termasuk di dalamnya imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal mengakui keberadaan *khiyâr majlis*. Menurut mereka penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyâr* selama masih berada di majelis akad. Walaupun akad telah sah dengan adanya *ijâb* (ungkapan dari penjual) dan *qabûl* (ungkapan dari pembeli), selama keduanya masih berada dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila akad *ijâb* dan *qabûl* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyâr* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan akad jual beli tersebut.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui keabsahan *khiyâr majlis*. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika *ijâb* dan *qabûl* sudah dilakukan dan sudah tidak ada hak *khiyâr* bagi keduanya. *Khiyâr* menurut mereka adalah bentuk kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian. Dengan demikian menurut

²⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), h. 113-

kedua imam tersebut akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaan dengan mengucapkan *ijâb* dan *qabûl*.²⁸

b. *Khiyâr Syarat*

Yaitu jika kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat *khiyâr* dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa *khiyâr majlis* berlangsung, dalam tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.²⁹ Tujuan disyariatkan *khiyâr syarat* ini adalah untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktu dalam *khiyâr syarat* tidak lebih dari 3 hari. Menurut mereka, tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Oleh karena itu, apabila melebihi waktu 3 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam hadits, maka akad jual belinya dianggap batal.

Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad (keduannya murid Imam Abu Hanifah), Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatasi hanya 3 hal, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena tujuan di isyaratkannya *khiyâr* tersebut adalah agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa, musyawarah terlebih

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, *ibid* h. 33-34

²⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 378

dahulu, dan terhindar dari penipuan. Hal ini menurut mereka tidak cukup waktu 3 hari. Batasan yang diberikan Rasulullah SAW. selama 3 hari menurut beliau cukup dalam waktu demikian, akan tetapi bukan berarti beliau melarang lebih dari itu. Pendapat inilah yang menurut Muhammad Ali Usman al-Faqi merupakan pendapat yang paling kuat.³⁰

c. *Khiyâr 'Âib*

Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan dari benda atau barang yang dibeli. Syarat-syarat berlakunya *khiyar 'âib* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjual belikan itu adalah sebagai berikut.³¹

- 1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima. Karena barang yang diperjualbelikan dalam dua keadaan itu (cacatnya sudah lama atau baru) masih dalam tanggung jawab penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian merupakan tanggung penjual. Apabila cacat yang terdapat pada barang diketahui setelah terjadi serah terima, maka bagi penjual tidak ada hak *khiyâr*, karena dalam keadaan demikian merupakan tanggungjawabnya pembeli.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, *ibid* h. 37

³¹ *Ibid.*, h. 39

mengetauinya, maka tidak ada hak khiyar baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukkan keridhaannya.

- 3) Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya *najîs* pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuhkannya, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.
- 4) Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.

d. *Khiyârut Ta'ayeen*³²

Ialah pemilihan yang diberikan kepada pembeli untuk memilih dalam tempo pemilihan yang ditetapkan, dengan satu barang yang dikehendakinya di antara beberapa barang yang ditetapkan harga bagi tiap-tiap satuannya.

Pembeli dalam *Khiyarut Ta'ayeen* hendaklah menentukan mana satu barang yang menjadi pilihannya sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan.

Khiyarut Ta'ayeen boleh diwariskan. Jika pembeli meninggal dalam tempo masa pemilihan maka ahli warisnya mengambil alih kuasa pemilihan itu.

e. *Khiyâr ar-Ru'yah*

Adalah hak bagi orang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan atau tidaknya ketika melihat tempat transaksi yang

³² Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 57

sebelumnya tidak diketahui.³³ Jumhur ulama mengatakan bahwa *khiyâr* ini diperbolehkan dengan alasan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad.³⁴

Adapun hikmah disyariatkannya *khiyâr* yaitu merupakan salah satu bentuk kebaikan Islam, karena terkadang ada jual beli secara seketika tanpa ada pemikiran dan pertimbangan, dan juga tidak memperhatikan harga dan barang sehingga penjual atau pembeli merasa menyesal. Karena itu, Islam memberikan kesempatan untuk memilih yang disebut dengan *khiyâr*. Diantara hikmah *khiyâr* ini adalah:³⁵

- 1) Membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu berdasarkan kerelaan.
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli.
- 3) Mendidik penjual agar bersikap jujur kepada pembeli.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli.
- 5) Dapat memelihara hubungan baik dan cinta kasih terhadap sesama.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai bentuk pemberian keleluasaan dari-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tak pernah berhenti sebelum manusia

³³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, *ibid.*, h.118

³⁴ Rizki Abdurahman, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bandung: Insan Rabbani, 2018), h. 56

³⁵ *Ibid.*, h. 57

meninggal. Dengan kata lain manusia dituntut agar dapat berhubungan dengan manusia lainnya sebagai salah satu caranya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, al-Qur'an dan al-Sunnah mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk umumnya saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam.

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan social mereka.³⁶ Manfaat jual beli menurut Rizki Abdurahman dalam bukunya yang berjudul Pengantar Fikih Muamalah adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. VIII

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, *Ibid.*, h.52

- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima dagangan dengan puas pula.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- e) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Dari induksi para ulama terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah dari kedua sumber hukum Islam yakni:

- 1) Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.
- 2) Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada umat manusia.³⁸

³⁸ *Ibid.*, h.IX

Adapun hikmah lain disyari'atkan jual beli (muamalah) adalah ketika uang, jasa, harta, barang perniagaan ada di salah satu pihak yang memiliki sedangkan disisi lain ada orang yang membutuhkannya dan tidaklah mungkin bagi sipemilik untuk memberikannya tanpa adanya ganti atas hal tersebut maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut.

Sekiranya jual beli tidak diperolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindakan perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.³⁹

7. Jual Beli Listrik Permeter

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.⁴⁰

Sedangkan tarif bayar listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif.⁴¹

Untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/Kvarh), dan atau biaya kVA maksimumnya yang dibayar yang berdasarkan harga langganan

³⁹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), h. 870

⁴⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 33 ayat (1).

⁴¹ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang dIsediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Pasal 2 Ayat 1

(Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.⁴²

Tujuan utama penyusunan tarif untuk memastikan bahwa:⁴³

- a. Pendapatan keseluruhan tahunan dapat menutup seluruh biaya pembangkitan, distribusi, dan transmisi.
- b. Diusahakan bahwa tiap kelas konsumen memenuhi biaya keseluruhan dari kelas tersebut.
- c. Bertambah banyaknya penggunaan listrik oleh sekelompok konsumen tidak akan berakibat bertambahnya kerugian daya.
- d. Penggunaan listrik daya dikembangkan sedemikian rupa sehingga ekonomi perusahaan bertambah baik.
- e. Tarif harus dimengerti oleh konsumen.
- f. Tarif harus adil untuk konsumen yang berbeda.
- g. Perubahan tarif dari waktu ke waktu dibuat untuk membuat hubungan baik dengan konsumen dan untuk membuat pengaturan tarif ekonomis.

Harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik semua ketentuan sudah terdapat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dalam BAB X Pasal 33 s/d Pasal 36

Pasal 33

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

⁴² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 34 ayat (1)

⁴³ AS Pabla, *Sistem Distribusi Daya Listrik*, Alih Bahasa Abdul Hadi (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 137

- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.

- (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda disetiap daerah dalam satuan wilayah usaha.

Pasal 35

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari Undang-undang diatas bisa diambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan suatu harga jual pada listrik haruslah ditetapkan dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Penetapan Harga dalam Islam

Transaksi jual beli harga memegang peranan penting untuk sebuah produk. Menurut Basu Swastha, harga ialah jumlah uang yang digunakan didalam pertukaran suatu barang. Sehingga harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh

penjual.⁴⁴ Tidaklah ada suatu perubahan tarif bila sebelumnya tidak ditetapkan dulu harganya, seperti dalam kasus penetapan diskon tarif tenaga listrik dimana ini terjadi karena adanya wabah yang mengguncang dunia yakni wabah/pandemi *covid-19*, membuat semua aktivitas terganggu mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, dll. Tentu dalam menentukan tarif tidaklah sembarangan, harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Begitu pula dengan adanya perubahan tarif dari harga semula ke harga yang baru terkhusus penerima listrik subsidi. Dalam Islam sendiri, penetapan suatu harga yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini adalah pemerintah, disebut dengan *Al Tas'ir Al-Jabari*. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dengan *Al Tas'ir Al-Jabari* akan diuraikan dibawah ini

Pengertian Penetapan harga dalam hukum Islam (*Al Tas'ir Al-Jabari*). Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *assaman* dan *as-sir*. "*As-Saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*As-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *as-si'ru* digunakan untuk menyebut harga (dipasar).⁴⁵

Hadits Rasulullah yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Bin Malik beliau berkata, Orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw.,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، أَلْقَا بَضُّ الْبَاسِطُ

⁴⁴ Arna Asna Annisa, Penetapan Harga Jual Produk Murabahah, *Jurnal Muqtasid*, Volume 4 No. 2, Salatiga 2013

⁴⁵ Aliyudin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi", (*Skripsi Program Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017*), h. 32-33

الرَّازِقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya: ‘Wahai Rasulullah, harga barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga barang untuk kami!’ Rasulullah saw menjawab, ‘sesungguhnya, hanya Allah yang berhak menentukan harga, Zat yang menggenggam, yang membentangkan, dan Yang member rezeki. Aku berharap bisa bertemu Allah dan tidak seorangpun dari kamu yang memintaku untuk berbuat kezaliman yang berkaitan dengan darah dan harta.⁴⁶

Berdasarkan hadits diatas Ulama fiqih menyatakan kenaikan harga yang terjadi dizaman rasulullah tersebut adalah bukan tindakan sewenang-wenang dari para pedagang,tapi karena memang komoditas yang ada dipasar terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik.

Menurut Yusuf Qardawi hadits diatas pada dasarnya menegaskan bahwa harga yang ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Semisal seorang penjual menjual dagangannya dengan baik dan tidak menandung kezaliman, namun harga naik karena banyaknya orang yang meminta barang tersebut. Namun jika terjadi berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi di pasar, misalnya adanya monopoli sehingga masyarakat sangat memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi, maka diperlukan intervensi terhadap pasar. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah tidak campur tangan membatasi harga komoditas dipasar tersebut jika harga yang

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3*, Terjemahan Asep Sobari[et. al.], (Jakarta Timur, Al-I’TISHOM, 2014)

berlaku dipasaran bersifat alamiyah, karena tindakan tersebut bersifat lalim bagi pedagang.

Definisi *al tas'ir al jabari* menurut beberapa ulama sebagai berikut:

a. Menurut imam Taqiyuddin An-Nabhani

Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.⁴⁷

b. Menurut Sayyid Sabiq

Tas'ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang tertentu yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula adanya kezaliman dari pembeli.

c. Menurut ulama Madzhab Hambali

Mendefinisikan *al tas'ir al jabari* dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.⁴⁸

⁴⁷ Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), *ibid.*, h. 380

⁴⁸ Aliyudin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi", (*Skripsi Program Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017*), h. 33

d. Menurut Ibnu Taimiyah

Mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran, yaitu keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga *mitsli* (harga pasaran). Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual dan tidak membeli kecuali dengan harga *mitsli* (harga pasar).

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum *tas'ir*. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, Ulama Muta'akhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*). Mereka mendasarkan pada Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁹

Menurut jumhur ulama *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebab *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk untuk menjual beli dengan harga tertentu. Pematokan harga tertentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2006) An-Nisa: 29

Ibnu Qudamah Al Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab Hambali ini, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. *Pertama*, *Rasulullah* tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk mengiginkannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu kezaliman.

Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi penentuan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh ada yang haram. *Tas'ir* ada yang dzalim, itu yang diharamkan, dan ada yang adil, itulah yang diperbolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai, maka tidak dibenarkan dalam agama. Namun jika penentuan harga menimbulkan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang atau peraturan lain untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini di bolehkan dan wajib diterapkan. Dengan demikian penentapan harga wajib dilakukan demi tegaknya keadilan sebagaimana yang dimintai Allah.⁵⁰

Akan tetapi, apabila para penjual berbuat zalim dan melampaui batas wajar dalam memberikan harga yang membahayakan aktivitas pasar, maka

⁵⁰ Aliyudin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi", (*Skripsi* Program Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 38

pemerintah harus turun tangan untuk menentukan harga demi kemaslahatan masyarakat banyak; mencegah terjadinya penimbunan barang dan kezaliman para penjual yang menimpa mereka. Para ulama mazhab Zaidiyah, di antaranya Said bin Musayyib, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad Al-Anshari berpendapat boleh menentukan harga bagi pemerintah apabila kemaslahatan publik menuntut hal itu.⁵¹

Mayoritas ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir* pemerintah (bahkan wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga meskipun barang mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam syari'at Islam, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Meski demikian pemerintah dalam menetapkan harga harus berpegang kepada syarat-syarat,⁵² yaitu:

1. Komoditi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dan menunjukan pakar ekonomi untuk menganalisa keadaan pasar.
3. Pematokan harga berdasarkan keadilan semua pihak,
4. Adanya pengawasan dari pemerintah secara terus menerus, dan
5. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.

Kaidah-kaidah ilmu fiqh atau yang sering disebut dengan (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah) peranan pemimpin atau penguasa dalam melakukan tindakan untuk kemaslahatan rakyatnya terdapat dalam kaidah ke-5 yakni:

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3*, (Jakarta Timur, Al-I'TISHOM, 2014), *ibid.*, h. 312

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 145

تَصَرَّفُ إِلَّا مَامَ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِأَمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin/ penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk dirinya sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنَزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya: “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Menurut beliau, fatwa beliau berasal dari fatwa Umar bin Khattab RA yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur dari Abu Ashwash dari Abi Ishaq dari Barro’ bin ‘Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَاجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَفْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Artinya: “Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri daripadanya)”.

Lapangan pelaksanaan kaidah ini adalah dalam bidang-bidang yang menyangkut bidang pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungannya

dengan rakyat, sehingga memberikan pengertian bahwa setiap tindakan/kebijaksanaan yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Dengan demikian tindakan penguasa yang hanya sekedar menuruti hawa nafsu serta kesenangan sendiri dan tidak membawa kebaikan pada rakyat adalah tidak benar.⁵³

Uraian diatas jelaslah bahwa peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan untuk masyarakatnya itu sangatlah penting, hal ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dalam hal ini adalah rakyat dimana tugas Negara tak hanya melindungi namun juga harus dapat menjamin agar setiap rakyatnya mendapatkan kesejahteraan serta keadilan.

C. Diskon

1. Pengertian Diskon

Menurut Mas'ud Machfoedz Diskon adalah penyesuaian harga yang ditetapkan untuk menghargai konsumen atas respon tertentu. Misalnya pembayaran rekening tagihan listrik tepat waktu, volume pembelian dan lain halnya⁵⁴

Diskon adalah potongan harga yang sering digunakan perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan dan hasil penerimaan penjualan serta *share* pasar perusahaan dengan memberikan potongan harga kepada pembeli yang membeli dalam jumlah besar atau kepada pembeli yang

⁵³ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh (Al-Qoaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 61-62

⁵⁴ Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, *Kewirausahaan Metode, Manajemen dan Implementasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), H.115

membayar dengan tunai.⁵⁵ Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diskon adalah pengurangan harga dimana hal ini biasa terjadi sebagai bentuk/cara penghargaan atau apresiasi kepada pelanggan yang baik karena bisa jadi pelanggan tersebut membayar lebih awal dari tanggal pembayaran ataupun ia membeli dalam jumlah besar dan lain sebagainya.

2. Jenis-jenis Diskon

Menurut Kotler (2007:485-486) membagi jenis *discount* menjadi beberapa yakni:

- a. Diskon tunai: penurunan harga bagi pembeli yang segera membayar tagihan.
- b. Diskon kuantitas: penurunan harga bagi orang yang membeli dalam jumlah besar.
- c. Diskon fungsional: adalah *discount* yang ditawarkan produsen kepada anggota-anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, melakukan pencatatan
- d. Diskon musiman: penurunan harga untuk orang yang membeli barang atau jasa diluar musim.
- e. Potongan harga: pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh partisipasi penjual ulang (*reseller*) dalam orogram khusus.

⁵⁵ Sofjan Assauri, *Managemen Pemasaran: Konsep, Dasar dan Strategi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 232

3. Tujuan Pemberian Diskon

Tujuan diadakannya *discount* atau potongan menurut Nitisemito yang dikutip oleh Arif Isnaini adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa naik.
- b. Pembeli dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual tersebut, sehingga hal ini dapat menambah langganan penjual yang bersangkutan.
- c. Merupakan *sale service* yang dapat menarik terjadinya transaksi pembelian.⁵⁶

D. Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ovy Mintia Loka Wilanda (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi” (Studi di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Hasil penelitian ini adalah⁵⁷
 - a. perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli (pedagang pengecer) pada *supplier* dalam jual beli daging sapi yang dilakukan di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan berbagai sebab, antara lain daging yang didapat warnanya agak keputihan, masih banyak gajih yang menempel pada daging saat diterima, sehingga setelah pedagang

⁵⁶ Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*, (Makassar: Ntp Press, 2005), h.89

⁵⁷ Ovy Mintia Loka Wilanda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah” (*Skripsi Program Muamalah UIN Raden Intan Lampung*, 2019)

pengecer mengurangi gaji yang menempel, beratnya menjadi berkurang. Perubahan harga itu dilakukan karena pedagang merasa mereka berhak mendapatkan ganti rugi terhadap daging yang cacat, yang mereka terima.

- b. Dalam kegiatan bermuamalah perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer diperbolehkan karena pedagang pengecer masih mempunyai hak *khiyâr* yang disebabkan adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian di atas membahas tentang perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli (pedagang pengecer) pada *supplier* dalam jual beli daging sapi sedangkan saya membahas tentang penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19*.

2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ade Mareta Handayani (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Lapak” (Studi di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:⁵⁸

- a. Dalam kasus perbedaan harga sewalapak di pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, merupakan kebijakan dari pemerintah desa, harga

⁵⁸ Ade Mareta Handayani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Lapak Studi di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat” (*Skripsi Program Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2019*)

yang ditentukan ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa yang berlaku di Kartu Tanda Penduduk nya. Aparatur desa dalam hal menetapkan harga lapak tersebut melihat dari sisi kemaslahatan masyarakat di desanya. Dimana faktor dari perbedaan harga tersebut diantaranya:

- 1) Pasar tersebut dibangun oleh swadaya masarakat setempat.
- 2) Untuk kemaslahatan masyarakat desa
- 3) Untuk peruntungan desa
- 4) Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Gunung Agung, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Maka diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

b. Penetapan harga lapak dipasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ditinjau dari hukum Islam adalah dibolehkan karena sesuai dengan ketentuan syara' dan banyak mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian di atas membahas mengenai perbedaan harga sewa lapak yang ditentukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa yang berlaku di kartu tanda penduduknya sedangkan saya membahas tentang penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19*.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliyudin (2017) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi” (Studi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung – Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung). Hasil penelitian ini adalah⁵⁹

a. Realita pelaksanaan Peraturan Gubernur lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi tidak dilaksanakan dengan baik, tarif yang dikenakan berbeda dengan Peraturan Gubernur tersebut. Penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan syarat yang membolehkan *al tas'irul al jabari* oleh ulama.

b. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu yang dilakukan oleh penyedia jasa bus tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam karena belum mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bermuamalat. Dengan pendekatan *Al Maqâsid Al Sharîah* diperoleh kesimpulan berupa :

1) Adanya ketidak jujuran dari pihak penyedia jasa angkutan umum terhadap penumpang dalam menetapkan tarif, sebagaimana harga

⁵⁹ Aliyudin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung- Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung” (*Skripsi* Program Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2017)

yang telah ditetapkan oleh pemerintah/ peraturan perundang-undangan.

- 2) Adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa yaitu memberikan harga yang terlampau tinggi sehingga masyarakat merasa terbebani.
- 3) Adanya ketidakrelaan antara penjual dan pembeli jasa dalam hal ini penumpang dikarenakan unsur pemaksaan sehingga menyebabkan pembeli tidak *rida* dengan jasa yang ia bayarkan.
- 4) Pada proses sewa-menyewa jasa, rukun dan syaratnya harus terpenuhi yaitu meliputi orang yang berakad, *sîghât*, *ujrah*/ manfaat serta adanya kerelaan dari semua pihak, dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh *syarîat*.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian di atas membahas mengenai pelaksanaan peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi tidak dilaksanakan dengan baik sedangkan saya membahas tentang penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi *covid-19*.

Penelitian dalam skripsi penulis yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi *Covid-19*, di Perusahaan Listrik Negara [PLN] Rayon Pringsewu didalamnya membahas tentang praktik penetapan diskon tarif tenaga yang ditetapkan dan diberlakukan

oleh PLN dengan memotong 50% dari 3 bulan jumlah keseluruhan pembayaran listrik terkhusus pada pemakai listrik bertegangan 900VA bersubsidi.



DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponogoro, 2006

II. Kelompok Hadis dan Syara'

Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqhalani, *Bulughul Maram Min Adillanti Ahkam*, Terjemahan Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Abdurahman, Ash-Shadiq Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Azhim Islahi Abdul, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terjemahan A. Anshari Thayib, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1997

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh Syarifuddin dan Mishbah Mustofa, Surabaya: CV Bina Iman: 1995

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3*, Terjemahan Asep Sobari[et. al.], Jakarta Timur, Al-I'TISHOM, 2014

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Abdul Majid, Umar Mujaahid, Arif Mahmudi, Jakarta Timur, Beirut Publishing, 2016

III. Kelompok Fiqih

Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh (Al-Qoaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008

Abdurahman Rizki, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bandung: Insan Rabbani, 2018

Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Darsono, Ali Sakti, Ascarya dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Gema Insani, 2008

Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindoIndo Persada, 2016

Ja'far Khumaidi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, cet.3 Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015

-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017

-----, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, *Kewirausahaan Metode, Managemen dan Implementasi*, Yogyakarta: BPFE, 2005

Muhammad Ali, *Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja AURA, 2013

Muthiah Aulia, *Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syaria*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016

Sarwat Ahmad, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017

Sofjan Assauri, *Managemen Pemasaran: Konsep, Dasar dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

IV. Kelompok Sumber Lainnya

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Aliyudin, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi Pada Bus Ekonomi*" Trayek Bandar Lampung- Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung", Skripsi Program Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2017

Arna Asna Annisa, Penetapan Harga Jual Produk Murabahah, *Jurnal Muqtasid*, Volume 4 No. 2, Salatiga 2013

AS Pabla, *Sistem Distribusi Daya Listrik*, Alih Bahasa Abdul Hadi, Jakarta: Erlangga, 1991

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.4, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hamzah Yu'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* Bandung: CV. Diponegoro, 1984

<https://web.pln.co.id/media/siaran/pers/202004/begini-cara-dapatkan-keringanan-tagihan-listrik-bagi-pelanggan-rumah-tangga-450-van-dan-900-van-subsidi> diakses pada tanggal 30 September 2020

<https://bdt.tnp2k.go.id/tanyajawab/> Tanya jawab umum Basis Data Terpadu diakses pada tanggal 30 September 2020

<https://mobile.facebook.com/LAYANAN.INFORMASI.PLN.LAMPUNG/> diakses Tgl 30 September 2020

<https://lifepal.co.id/media/daftar-tarif-listrik-terbaru/> diakses tanggal 30 September 2020

Ovy Mintia Loka Wilanda, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi*, di Pasar Bandar Jaya

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”
(Skripsi Program Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Pengertian Virus Corona (On-line), tersedia di:
<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> (16 Juni 2020)

Peraturan Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral Nomor 28 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Listrik Negara (Persero)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008

Susidi, *Metode Penelitian*, Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009

Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

V. Kelompok Wawancara

Wawancara dengan Eka Sapta Ningsih sebagai salah pegawai di PT PLN (Persero) Rayon Pringsewu yang mengetahui mekanisme subsidi listrik 900 VA masa pandemi *Covid-19* pada tanggal 16 September 2020

Wawancara dengan Hari Nugroho selaku SRM SDM dan MUM PLN UID Lampung tanggal 20 Oktober 2020

Wawancara dengan Muhammad Said sebagai salah pegawai di PT PLN (Persero) Rayon Pringsewu yang mengetahui mekanisme subsidi listrik 900 VA masa pandemi *Covid-19* pada tanggal 16 September 2020

Wawancara dengan Bapak Sulaiman sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 03 September 2020

Wawancara dengan Ibu Suparmi selaku penerima subsidi listrik tarif dengan daya 900VA masa pandemi *Covid-1*, pada tanggal 03 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Suwardi selaku penerima subsidi listrik tarif dengan daya 900VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Wawancara dengan Bapak Jumino selaku penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 02 Oktober 2020

Wawancara dengan Bapak Lukman sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Wawancara dengan Bapak Poniman sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 03 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Tati Suryati sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 03 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Jirah sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Suko Wati sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Wawancara dengan Bapak Suratno sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Suwarni sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 03 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Siti Suratin sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Rohayatun sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Wawancara dengan Bapak Armadi Rusban sebagai penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA masa pandemi *Covid-19*, pada tanggal 04 Oktober 2020

